

## Kepemilikan Saham Tol Bali Belum Berubah

JAKARTA – Komposisi kepemilikan saham di PT Jasamarga Bali Tol (JBT) masih tetap, menyusul tak diizinkan PT Wijaya Karya Tbk (Wika) keluar dari perusahaan konsorsium tersebut oleh Menteri Pekerjaan Umum. Wika masih memiliki saham 5% di JBT yang akan mengoperasikan jalan tol tersebut.

“Saat ini kami masih ikut di tol Bali, karena Menteri PU tak mengizinkan kami keluar dari perusahaan tersebut,” ungkap Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk Natal Argawan Pardede saat dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, Rabu (24/4).

Kendati demikian, sambung dia, perusahaan tetap berkeinginan untuk keluar dari badan usaha jalan tol tersebut guna mengembangkan bisnis lain. Namun, upaya itu dapat terealisasi apabila diizinkan oleh Menteri PU ataupun menunggu hingga tol sepanjang 9,7 kilometer tersebut beroperasi.

“Kami masih memproses pengalihan saham itu kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung. Itu kan juga hasil dari rapat umum pemegang saham (RUPS),” tambah Natal.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mendukung agar Wika keluar dari anak perusahaan PT Jasa Marga Tbk tersebut. Itu dilakukan karena jalan tol dengan investasi Rp 2,5 triliun tersebut sudah hampir selesai dan nilainya terlalu kecil untuk Wika. “Tawarkan kepada badan usaha milik daerah dengan harga menarik, lalu keluar,” tegas dia.

Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga Tbk David Wijayatno mengungkapkan, komposisi saham di Jasamarga Bali Tol masih tetap, meski sebelumnya tersiar kabar Wika keluar dari konsorsium. “(Komposisi sahamnya) masih tetap. Kami tidak tahu apa nanti masih tetap atau tidak. Bisa tanyakan langsung ke Wika,” ujar dia, baru-baru ini.

Sementara itu, Direktur Utama JBT Akhmad Tito Karim tidak bersedia berkomentar saat ditanya mengenai komposisi saham di perusahaannya. “Saya tidak mau berkomentar soal itu,” kata dia.

Saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) JBT, 23 Januari 2013, disepakati bahwa komposisi saham JBT berubah karena Wika keluar. Komposisi sahamnya menjadi PT Jasa Marga berkurang menjadi 55% dari 60%, PT Pelindo III 17,98% dari 20%, PT Angkasa Pura I 8% dari 10%, PT Utama Karya dan PT Adhi Karya Tbk 1% dari 2%, PT Pengembangan Pariwisata Bali tetap 1%, dan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung masing-masing 8,01%. Namun, karena posisi Wika masih tetap, saham Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung tidak masih hitungan. (ean)